



Buletin Parlementaria

Nomor 983/1/XI/2017 • November 2017



**Taufik Kurniawan Tolak
Politisasi Dana Desa**

**Paripurna DPR Setujui
RUU PPMI Jadi Undang-undang**

Perppu Ormas Disetujui DPR Melalui Mekanisme Voting

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali memberikan laporan Perppu Ormas kepada Mendagri

Perppu Ormas Disetujui DPR Melalui Mekanisme Voting

Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Perppu tersebut disahkan menjadi UU melalui mekanisme voting karena musyawarah mufakat tidak tercapai meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam. Tercatat tujuh fraksi menyetujui Perppu sebagai UU yakni PDI-Perjuangan, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat dan Hanura. Namun diantara yang menerima itu Fraksi PPP, PKB dan Demokrat memberikan catatan agar pemerintah bersama DPR merevisi Perppu usai disahkan.

Sementara itu, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN dan Gerindra tetap pada pendiriannya menolak Perppu Ormas karena dianggap bertentangan dengan azas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme

pembubaran ormas.

"Kita telah mendapat hasil, dengan total 445 anggota, sebanyak 314 anggota menerima dan 131 menolak. Dengan demikian, mempertimbangkan catatan yang telah dipertimbangkan maka paripurna menyetujui Perppu No 2/2017 menjadi UU," jelas Fadli di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo mengatakan hadirnya Perppu ini mencermati gelagat dan perkembangan dinamika yang ada. Banyak Ormas yang dalam aktivitasnya mengembangkan paham atau ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Atas dasar

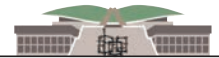
itu negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakekatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu harta benda dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorialnya masing-masing. Dengan kedaulatan yang ada pada negara, negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya untuk memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Dia menegaskan Perppu Ormas merupakan penegasan komitmen pemerintah terhadap ideologi bangsa dalam rangka mempersatukan bangsa.

"Menghargai pendapat akhir fraksi yang ada, pemerintah punya keyakinan antara pemerintah dan DPR mempunyai komitmen yang sama menjaga ideologi Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sesuatu hal yang sudah final. Pada prinsipnya pemerintah terbuka untuk melakukan penyempurnaan terbatas dalam arti urusan Pancasila, ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah kata final," jelasnya. ■

(rmm/sc)/hw. Foto: Iwan/od.



Paripurna DPR Sahkan APBN 2018

Rapat Paripurna DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (RAPBN 2018) menjadi Undang-Undang. Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Gerindra yang menyatakan penolakannya. Sedangkan 9 Fraksi menyatakan persetujuannya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima laporan dari Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin.

“Dari sepuluh fraksi, delapan fraksi setuju, satu fraksi yakni Gerindra menolak, satu fraksi menerima dengan catatan yakni PKS. Maka saya tanyakan, Apakah pembahasan RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan?” kata Taufik Kurniawan. “Setuju,” jawab seluruh hadirin Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (25/10/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Anggaran Azis Syamsuddin mengawali laporan hasil pembahasan tingkat I di Banggar, diantaranya terkait asumsi dasar yakni pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, Rupiah Rp13.400 per USD, SPN 3 bulan 5,2 persen, ICP USD48 per barel, lifting minyak 800 ribu bph dan lifting gas bumi 1.200 bph.

Sementara target pembangunan yakni diantaranya tingkat pengangguran

5-5,3 persen, tingkat kemiskinan 9,5 persen-10 persen, gini ratio 0,38, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,5.

Lalu, terkait defisit anggaran, ditetapkan Rp 325 miliar atau 2,19% dari PDB. Meski demikian Azis meyakini pemerintah akan tetap menjaga defisit dalam batas aman untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mengendalikan kerentanan fiskal.

Usai disahkan menjadi UU, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pemerintah dengan DPR selama pembahasan ini. Ia menekankan pada aspek pengelolaan utang akan ditujukan guna menjaga ratio utang dibawah 30% dari PDB.

“Defisit diarahkan untuk kegiatan produktif sehingga kemampuan pembayaran kembali dapat dijaga pada masa yang akan datang,” ujar Sri Mulyani. ■

(hs/sc)/w. Foto: Andri/od.

- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- WAKIL KETUA PENGARAH**
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
- ANGGOTA REDAKSI**
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patulli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
- ADMINISTRASI FOTO**
Bagus Mudjiharjanto
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

- PIMPINAN PENERBITAN**
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
- STAF PRODUKSI**
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom
- DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
- ADMINISTRASI**
Sjaefudin, S.Sos
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Mujiono
- PHOTOGRAFER ART**
Friederick Munchen
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan, Izzu Fauzul Umam
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

(Muenchen/Penerbitan)



Rieke Diah Pitaloka, M. Hum, Anggota DPR-RI No. A-160 dari fraksi PDI-P Dapil Jawa Barat mendapat gelar Duta Informasi Ilmiah dari LIPI oleh Prof.Dr.Bambang Subiyanto, M.Agr, Plt. Kepala LIPI dan Prof. Dr.Arief Rachman, M.Pd, Ketua Harian KNIU

Pimpinan Komisi II Laporkan Pembahasan Perppu Ormas

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali melaporkan hasil pembahasan Perppu Ormas yang penuh polemik ini ke hadapan Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Dalam laporannya disebutkan tujuh fraksi mendukung dan tiga fraksi menolak.

Dijelaskan Zainuddin, Selasa (24/10/2017), dalam laporannya, dari tujuh fraksi yang setuju, empat diantaranya F-PDI Perjuangan, F-PG, F-Nasdem, dan F-Hanura menerima RUU tentang Penetapan Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Tiga fraksi lainnya, yaitu F-PD, F-PPP, dan F-PKB menyetujui dengan catatan. Sementara itu, tiga fraksi tersisa, F-PKS, F-Gerindra, dan F-PAN menolak Perppu ini disahkan menjadi UU.

Seperti diketahui, RUU yang sedang menjadi polemik di parlemen maupun di masyarakat ini adalah RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2017 tentang Perubahan atas UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi UU. "Yang menjadi dasar pembahasan ini adalah Surat Presiden RI No.R-38/pres/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2017 tentang perubahan atas UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi

UU," ungkap Zainudin.

Selain itu, lanjut politisi Golkar ini, ada keputusan rapat Pimpinan DPR RI dan Fraksi-fraksi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI untuk membahas RUU Ormas tersebut. Komisi II sudah menyerap pandangan dan aspirasi masyarakat menyangkut hal ini dengan berkunjung ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tiga provinsi itu dipandang sangat tepat karena jumlah penduduknya yang tinggi dan keberagaman Ormasnya juga sangat banyak.

Bahkan, Komisi II sudah pula meminta pandangan para ahli, seperti Azumardi Azra, Yusril Ihza Mahendra, Rafly Harun, Romli Atmasasmita, Irman Putra Sidin, Pitra Asril, Hendar, dan Ruby Kholifah. Tak ketinggalan berbagai Ormas didengar pandangannya, seperti MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, perwakilan umat Budha Indonesia, Persada Hindu



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali.

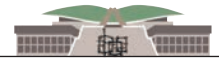
Dharma Indonesia, Pemuda Pancasila, FKPKPI, Matlaul Anwar, Persatuan Serikat Islam, Aliansi Ormas Islam se-Provinsi Banten, AI Wasliyah, FPI, dan eks HTI.

Pembahasan RUU ini selalu terbuka untuk umum, agar masyarakat mengetahui dinamika yang terjadi di Komisi II. "Pembahasan ini sangat demokratis," ucap Zainudin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon itu, akhirnya dihujani interupsi dari para anggota. Pro dan kontra disampaikan dengan berbagai argumen. Akhirnya, rapat pun sempat diskors untuk melakukan lobi atas RUU Ormas tersebut. ■

(mh/mp)/iw. Foto: Jayadi/od.

Paripurna DPR Setujui RUU PPMI Jadi Undang-undang

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan Rapat Paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang. "Selanjutnya kami menanyakan kepada seluruh Fraksi di DPR RI, apakah RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Pimpinan Rapat Paripurna yang juga Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kepada seluruh peserta Rapat Paripurna, lalu dijawab "setuju," ketukan palu menjadi tanda persetujuan para Anggota Dewan.



Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini merupakan RUU yang berupaya mengoreksi kelemahan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tata kelola yang lebih memperkuat aspek perlindungan kepada pekerja migran Indonesia sekaligus mengoreksi praktek-praktek yang telah berlangsung yang merugikan pekerja migran.

Dalam RUU ini, peran negara diperkuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Karena sudah menjadi keharusan negara untuk menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk

memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Dalam laporannya atas hasil Pembicaraan Tingkat I di Komisi IX, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Efendi menyampaikan, seluruh anggota Komisi IX telah berupaya secara maksimal untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang yang terbaik bagi kepentingan nasional, bangsa dan negara. Terutama kepada para pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.

"Selanjutnya besar harapan kami setelah RUU ini disahkan, pemerintah segera melakukan sosialisasi serta menyusun beberapa peraturan

pelaksanaan yang diamanatkan RUU ini selama dua tahun, agar RUU ini dapat berlaku efektif," ujar Dede di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Dede juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh komponen masyarakat yang berpartisipasi menyampaikan aspirasi, kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, semua Fraksi dan Pemerintah.

"Serta semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu, atas kerjasamanya, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan," tangkup Dede mengakhiri laporannya. ■

(eko/sc)/iw, Foto: Jakarta/od.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berjabat tangan dengan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf

Masa Sidang I DPR Selesaikan 8 RUU

Dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyetujui delapan RUU selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 - 2018. Demikian isi Pidato Ketua DPR RI Setya Novanto pada penutupan Masa Sidang I TS 2017 – 2018 di Gedung DPR, Senayan, Rabu (25/10/2017).

Kedelapan RUU yang telah diselesaikan, yakni: RUU tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri). Konvensi ini mengatur pengadaan, perdagangan merkuri, senyawa merkuri termasuk pertambangan merkuri.

Kedua, RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak). Dengan pengesahan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama

perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Ketiga, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi. Keempat, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kelima, RUU tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia).

Keenam, RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. RUU ini secara komprehensif mengatur mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, DPR baru saja mengesahkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang mengalami perubahan judul dari RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RUU ini akan mengatur pemisahan regulator dan operator secara tegas serta mengamanatkan adanya Pelayanan Terpadu Satu Atap bagi pekerja migran. Terakhir, RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

Sementara di bidang pengawasan, DPR memantau kegiatan pelayanan ibadah Haji Tahun 1438H/2017. Dalam pemantauannya, DPR masih menemukan sejumlah kendala di lapangan, meskipun telah ada penambahan kuota haji menjadi 221.000 jamaah.

Untuk itu, DPR mendorong pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan haji di Arab Saudi serta mengoptimalkan fasilitas layanan dan perlindungan jamaah haji dengan diplomasi *Government to Government* dan *Business to Business* antar kedua negara.

Sementara itu, terkait peran diplomasi parlemen, Indonesia dan beberapa negara berhasil mendorong diadopsinya resolusi terkait isu Rohingya dalam Sidang *Inter-Parliamentary Union Assembly* (IPU) di St.Petersburg, Rusia.

Selain menghadiri dan mengirimkan delegasi, DPR RI sendiri juga menjadi negara penyelenggara pertama Konferensi *“World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals”* pada 6-7 September 2017 di Nusa Dua, Bali.

Terkait dengan fungsi DPR di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. DPR terus berbenah diri dan terus bekerja. Dengan semangat untuk terus melakukan perbaikan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat, pimpinan DPR mengajak seluruh anggota DPR untuk terus memaksimalkan peran dan fungsinya, sesuai dengan amanah konstitusi. ■



Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna Ke 10 Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018.

(ann/so), Foto: Kresno/od



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani.

DPR Dukung Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali

Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Pimpinan DPR lainnya dan Ketua Banggar mendukung perhelatan akbar *Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB) Group 2018* di Bali. Meski mendukung, pihaknya tetap akan mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

“DPR memahami maksud pemerintah menggelar Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Maka dari itu kami mendukung namun, kami tetap akan melakukan pengawasan pelaksanaan acara itu,” ungkap Novanto usai menerima penjelasan mengenai perhelatan IMF-WB dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Walaupun menghabiskan biaya Rp 817 miliar dari APBN 2018, Novanto menilai acara tersebut akan memberikan arti yang besar untuk kemajuan Indonesia. Terlebih yang akan hadir dalam acara tersebut mencapai 15 ribu orang.

“Langkah ini sangat baik untuk mendukung perekonomian kita, karena pada akhirnya dana yang diberikan melalui APBN ini akan kembali dengan kunjungan para turis,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani

menjelaskan kepada awak media kedatangannya bersama Luhut untuk menjelaskan kepada Setya Novanto dan para Pimpinan Lembaga Legislatif mengenai pentingnya acara IMF-WB. Pihaknya bersyukur dalam pertemuan baik Badan Anggaran (Banggar) maupun para Pimpinan DPR memahami kebutuhan akan acara tersebut.

“Jadi dari penganggaran kami akan menggunakan APBN 2018 dan akan diawasi oleh DPR,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan mengapa acara tersebut penting bagi Indonesia. Terutama menyangkut isu yang akan dibahas baik pembangunan infrastruktur maupun kepentingan Indonesia dalam menjelaskan program-program pemerintah.

“Pak Luhut sampaikan aspek-aspek dari sisi anggaran tersebut dan apa harapan yang bisa dimanfaatkan dari penyelenggaraan tersebut termasuk penggunaan hotel di Bali selama 7 hari

oleh 15 ribu dan pengeluaran yang mereka lakukan, dan belanja peserta IMF-Bank Dunia,” ungkapnya.

Kemudian, dalam pertemuan tersebut pemerintah akan memperbaiki berbagai macam infrastruktur yang tidak hanya untuk acara ini. Tapi secara tidak langsung infrastruktur ini terbagun yang nantinya akan dipakai oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam kesempatan itu, Luhut memaparkan dari dana yang dibutuhkan sebesar 817 Miliar, sekitar 300 Miliar akan digunakan untuk membeli fasilitas komputer serta kursi dalam menunjang perhelatan besar itu. Usai acara, berbagai fasilitas tersebut akan disalurkan kepada sekolah di wilayah Indonesia yang memerlukan.

Dia juga menyampaikan, hal yang cukup penting adalah acara tersebut akan dijadikan ajang promosi Indonesia, mulai dari skema pembiayaan infrastruktur hingga turisme. Bahkan dijelaskan Luhut, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde akan menyelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. “Belum pernah terjadi dalam sejarah Bank Dunia dan IMF, Ketuanya tiga kali datang ke Indonesia. Ini menunjukkan pandangan positif terhadap Indonesia,” pungkasnya. ■

(ria/mp). Foto: Jakaod

BPK Diminta Audit Dana Otsus Aceh

Ketua Tim Pemantau Otsus DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif khusus terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Hal itu guna mengetahui implementasi dana Otsus yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

“Bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan kami meminta dilakukan audit investigatif khusus oleh BPK terkait penggunaan dana Otsus di Aceh untuk melihat struktur bahwa dana tersebut sudah digunakan dengan sebaik mungkin dan sampai kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan,” ucap Fadli usai melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Aceh beserta jajaran dan mitra kerja terkait di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (23/10/2017).

Terkait berlakunya dana Otsus Aceh hingga 20 tahun, Fadli berharap ke depan jangka waktu pemberian dana bisa diperpanjang

seumur hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap dana Otsus yang sudah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Oleh karena itu kami akan terus menggali dan menggiatkan evaluasi, sehingga diharapkan pelaksanaan atau penggunaan dana Otsus Aceh tepat sasaran,” harap politisi F-Gerindra itu.

Senada dengan Fadli, Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil mendukung adanya audit investigatif khusus agar ke depan pengelolaan dana Otsus Aceh bisa lebih baik dan tepat sasaran.

“Sebab harus kita akui Aceh ini dalam serapan pendidikan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan serta

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya masih jauh. Oleh karena itu adanya audit khusus agar ke depan peruntukan dana Otsus ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ungkap Nasir.

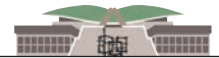
Politisi F-PKS ini menilai dana Otsus Aceh cukup besar, mencapai Rp 56,6 triliun. Sehingga, anggaran yang sudah digunakan bagi pembangunan infrastruktur dapat dikorelasikan dengan kesejahteraan masyarakatnya.

“Semangat dari Otsus ini yaitu bagaimana masyarakat Aceh bisa sejahtera. Maka dana yang sudah digunakan untuk pembangunan di Aceh, seperti apa korelasinya dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan lainnya,” kata Nasir.

Di sisi lain, Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI yang juga anggota Komisi V DPR RI Firmandez berharap jangka waktu pemberian dana Otsus Aceh tidak dibatasi, sehingga benar-benar dapat digunakan secara tepat sasaran, dan



Ketua Tim Pemantau Otsus DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat kunjungan kerja ke Banda Aceh.



memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Aceh.

“Oleh karena itu, saya berharap agar dana Otsus ini jangan dibatasi sampai 20 tahun saja, tetapi seumur hidup seperti dengan yang ada di Papua. Dana Otsus berbeda dengan dana infrastruktur, jadi diharapkan dana Otsus yang diberikan ini bisa memberikan semangat pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di Aceh khususnya,” harap politisi F-PG itu.

Kunjungan Tim Pemantau Otsus DPR ke Aceh ini juga diikuti oleh Fadhlullah (F-PG), Rufinus Hotmaulana (F-Hanura), dan Irmawan (F-PKB).

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf beserta jajaran, Muspida Aceh, Kepala BP Kawasan Sabang, perwakilan Direksi PT Pertamina, perwakilan Pelabuhan Indonesia, Perwakilan Pelindo I, Perwakilan Pupuk Iskandar Muda, Perwakilan PT Medco, dan Perwakilan PT Nindya Karya. ■

(tra.mp, Foto: Arie/od)

Tim Pemantau Otsus DPR RI Kunjungi Aceh

Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI ke Provinsi Aceh, Senin (23/10/2017).

Sesuai dengan Keputusan DPR RI No. 10/DPR RI/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pemantauan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) harus dilakukan agar tercipta dukungan politik yang semakin kuat untuk keberhasilan pelaksanaan Otsus ke depan.

“Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan otonomi khusus dan daerah istimewa belum optimal dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat,” ungkap Fadli dalam sambutannya di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Korpolkam tersebut mempertanyakan beberapa isu krusial terkait implementasi pelaksanaan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Salah satunya terkait pemanfaatan dana Otsus Aceh yang sudah diberikan dan diterima Pemerintah Aceh dari tahun

2008 sampai dengan 2017 sejumlah Rp56,6 Triliun, apakah sudah tepat sasaran,” tanya politisi F-Gerindra itu.

Pemerintah Provinsi Aceh memperoleh dana Otsus yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sejak tahun 2008 hingga 2017 jumlah dana Otsus yang telah diterima Provinsi Aceh diperkirakan mencapai Rp56,6 triliun.

Dana Otsus menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan Aceh, dengan rata-rata peningkatan penerimaan 11 persen per tahun. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) 2015 yang berjumlah Rp12,7 triliun, lebih dari separuhnya berasal dari dana Otsus. Dana Otsus akan diterima Aceh sampai 2027. Selama 20 tahun jangka waktu berlakunya dana Otsus, Aceh diperkirakan akan menerima senilai Rp163 triliun. ■

(tra.mp), Foto: Arie/od



Tim Pemantau pelaksana UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh meninjau lokasi IPAL di Gampong Pande, Aceh



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

Rapat 5 Jam Hasilkan Data Konkret Perbatasan

Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara dalam rangka menyerap aspirasi dan permasalahan yang ada di daerah perbatasan, Rabu (18/10/2017).

“Hari ini, rapat lebih dari 4 jam bahkan hampir 5 Jam yang menghasilkan data yang konkret untuk daerah perbatasan dan merupakan data yang sangat penting yang berasal dari usulan-usulan untuk memperkuat data dalam hal pembangunan daerah perbatasan ini”, kata Agus.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah ini menjelaskan, di Talaud ini sektor unggulannya perikanan sehingga sektor ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, “Dalam hal ini pemerintah pusat, harus memberikan dukungan dan bantuan supaya sektor perikanan di sini menjadi jauh lebih baik dan berkembang ke mancanegara,” jelas

Agus.

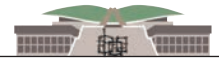
Selain itu, hal terpenting yang harus diupayakan adalah membangun pusat pemasaran perikanan. Saat ini di Talaud memang belum ada, tapi harus segera dibuat pusat pemasaran perikanan yang sangat besar, guna menunjang sektor perikanan di wilayah perbatasan ini.

Pimpinan DPR Bidang Korinbang ini mengatakan, Indonesia sangat dimungkinkan untuk mendatangkan negara tetangga untuk membeli ikan yang dihasilkan sehingga bisa meningkatkan perekonomian, “Jangan sampai kehidupan kita nantinya tidak lebih baik dari pada negara tetangga, karena jika telena dengan keadaan yang sekarang

kita bisa ketinggalan oleh negara tetangga,” jelasnya.

“Untuk Miangas, di sana lebih baik kehidupannya, maksudnya kita harus jaga kondisi ini agar nantinya tidak ada kecemburuan sosial dan menjadi sulit,” imbuh Agus.

Agus mengharapkan agar segera dibuat program untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti pabrik pengalengan ikan. Saat ini perikanan hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ke depan harus bisa memenuhi kebutuhan provinsi dan ekspor supaya bisa mengundang pemodal untuk menanamkan investasinya. ■



Taufik Kurniawan Tolak Politisasi Dana Desa

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan beranggapan alokasi dana sebesar Rp 1 miliar per desa jika dikelola secara baik dan akuntabel bisa menghapuskan disparitas ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Namun yang menjadi masalah, menurut Taufik, dana desa sebesar itu malah dipolitisir, dimanfaatkan untuk kepentingan politik golongan.

Taufik menjelaskan, prinsipnya dia mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa lewat dana desa, namun yang disesalkannya, dana desa justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik. “Hanya desa-desa yang dekat dengan faktor politik itu dapat bantuan. Seharusnya semua desa dapat. Tidak hanya desa yang didampingi dari partai politik tertentu, ada muatan politik,” ujar Taufik dalam International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2017, di Hotel Santika, Semarang, Selasa (24/10).

Taufik mencontohkan, saat ini ada indikasi penyelewengan bantuan dana desa dengan cara lewat pendamping dana desa, dana desa bisa dikucurkan jika desa tersebut memilih partai tertentu. “Kalau ini disisipkan unsur-unsur politis kami tidak setuju,” ujar Taufik.

Menurutnya, politisasi dana desa disebabkan, stakeholder dalam kementerian desa belum kuat sampai ke tingkat desa. Untuk menghindari politisasi dana desa dia mengusulkan agar dana desa dikaji kembali dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyaluran dan pengawasan dana desa. Karena dua kementerian tersebut memiliki struktur organisasi sampai dengan ke pelosok-pelosok desa.

Sehingga target kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) untuk mensejahterakan

masyarakat desa menjadi realistis. “DPR usulkan kalau idealnya menggandeng Kemendagri dan Kementerian PU karena mereka memiliki struktur aparat hingga tingkat desa,” kata Taufik.

Pimpinan DPR Korekku ini menjelaskan, Kemendes memiliki beban teknis terkait dana desa, namun keberadaannya hanya ada di Jakarta, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum ada. Dia menjelaskan penguatan personil itu

desa harus dilakukan BPK, karena dana negara pertanggungjawabannya juga harus secara jelas untuk kepentingan negara. Dia juga beranggapan dana desa tidak bisa dijalankan oleh auditor independen karena menyangkut penggunaan anggaran negara.

“Tenaga pendamping harus melibatkan unsur pemerintah sehingga tidak boleh menggunakan pihak independen karena menyangkut uang negara,” katanya.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2017, di Semarang

sangat diperlukan, sehingga ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit, dari aspek kelembagaan ada pejabat yang bertanggung jawab.

“Kemendes hanya ada di Jakarta, tidak ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota namun sebenarnya memiliki beban teknis sehingga perlu ada simpul pembuat kebijakan terkait dana desa,” ujarnya.

Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan, pengawasan dan audit penggunaan dana

la tidak menginginkan auditor independen mengaudit dana desa karena dikhawatirkan dimanfaatkan oleh satu atau dua parpol untuk dipolitisasi. Dia menegaskan DPR mendukung penyaluran dana desa karena bisa membuat program yang bagus untuk desa-desa namun harus diperbaiki infrastruktur regulasi, infrastruktur auditor, dan infrastruktur kapasitas sumber daya manusia. ■

(eko/mp), Foto: Eko/od



Ketua DPR Setya Novanto bersama Presiden Joko Widodo menghadiri Haul ke-28 Almarhum KH. Aqil Siroj.

Jokowi dan Novanto Hadiri Haul Ke-28 Alm KH Aqil Sirodj

Bersama Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Setya Novanto menghadiri Haul ke-28 Almarhum KH. Aqil Siroj, ayahanda Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Sirodj. Acara berlangsung di Pondok Pesantren KHAS, Kempek, Cirebon, Jumat (20/10).

Haul dan Khotmil Quran ini mengangkat tema 'Merawat Tradisi untuk Memperkokoh NKRI'. Dalam acara ini, turut juga hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden

Heru Budi Hartono, dan paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"Senang sekali bisa hadir disini. Apalagi Pak Presiden juga turut hadir.

Pondok pesantren merupakan salah satu ruh Bangsa Indonesia. Para kyai dan santri, maupun masyarakat di lingkungan pondok pesantren telah membantu perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan" kata Novanto usai mengikuti acara tersebut. Baik Presiden Jokowi maupun Novanto sama-sama mengagumi Pondok Pesantren KHAS Kempek yang diasuh KH Musthofa Aqil Siroj.

"Pondok pesantren KHAS dekat sekali dengan kehidupan masyarakat. Berbagai aktifitas pesantren, seperti pendidikan dan pengabdian masyarakat, serta aktifitas perekonomian saya yakin dapat langsung menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat," ungkapnya.



Daerah Desak RUU PKS Disahkan

Desakan untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengalir dari daerah, salah satunya di Manado.

Dalam kunjungan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Komisi VIII DPR ke Manado, Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Perlindungan Anak Sulut menyampaikan dukungan dan masukan-masukannya terhadap RUU PKS.

Komda PA Sulut Juli Takaliuang, menyampaikan aspirasinya atas kunjungan dan kesediaan Komisi VIII DPR mendiskusikan masukan-masukan terhadap RUU PKS ini. Dalam kesempatan tersebut juga, Komisi VIII DPR menerima Petisi Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia Timur.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR yang telah memberi ruang bagi kami untuk menyampaikan substansi-substansi perjuangan FPL terkait RUU PKS yang menjadi agenda penting Prolegnas tahun 2018," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar Komisi VIII DPR segera membahas dan mengesahkan RUU PKS dengan memperhatikan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual secara komperhensif.

"Kami menaruh harapan besar pada Komisi VIII DPR RI untuk memastika

perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual tertuang dalam RUU PKS," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti sampaikan bahwa masukan-masukan dari FPL sangat bagus dan bisa menjadi masukan terhadap RUU PKS.

"Ternyata di Sulawesi Utara menunjukkan grafik yang signifikan tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya, kita juga berharap RUU PKS ini mampu menjawab berbagai persoalan kekerasan seksual di daerah-daerah yang memiliki geografis yang berbeda-beda," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menyarankan supaya FPL menyurati Komisi VIII DPR meminta dilakukannya RDP terkait substansi-substansi RUU PKS yang beberapa poin pentingnya justru di-skip oleh pemerintah. ■

(sk/isc) - Foto: Singgih/od.

Tak lupa, usai shalat maghrib berjamaah, Novanto juga mengirimkan doa untuk almarhum KH Aqil Sirodj. Novanto yakin perjuangan almarhum dalam memajukan umat akan selalu diteruskan oleh generasi anak cucu beliau, dan juga generasi muda umat Islam.

Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan, "Saya kalau datang ke pesantren selalu ingat pesan kiai, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa Islam dan kebangsaan adalah selaras, tidak ada pertentangan, sehingga bangsa Indonesia sampai saat ini bisa merawat keberagaman dan kebhinekaan," ujarnya saat memberikan sambutan. ■

(ik/mp), Foto: Jeka/od.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menerima dokumen masukan RUU PKS dari Komda PA Sulut

Komisi II serap Aspirasi Masyarakat Kaltara



Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo menerima aspirasi masyarakat Kalimantan Utara.

Komisi II DPR menerima kunjungan Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membahas usulan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan daerah persiapan DOB ditanggung oleh kabupaten induknya.

“Kami akan mendukung sepenuhnya keinginan pembangunan Kaltara, walaupun saat ini masih moratorium.

Tapi, dalam pembahasan dengan pemerintah Kaltara selalu diprioritaskan,” ungkap Fandi di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Masih kata Fandi, pihaknya akan terus mendukung DOB. Peralannya, dia menilai masalah DOB bukan anggaran, tetapi daerah perbatasan yang harus dijaga. Pihaknya menyatakan akan mencari

solusi pemerintah membuka keran penetapan DOB.

“DOB penting terutama di daerah perbatasan. Kalau Pak Jokowi belum mau membuka keran, tugas kita melobi pemerintah untuk membuka keran itu. Sebagai provinsi baru, Kaltara membawa harapan baru, kita akan memperjuangkan segala hal ini,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian yang mengatakan, Provinsi Kaltara adalah

daerah perbatasan yang saat ini memiliki potensi yang sangat besar, namun belum sepenuhnya bisa diperhatikan. “Kesulitan yang dialami itu, insya Allah akan bisa dipercepat pembangunan dan solusi bisa ditemukan, jika diberikan kesempatan menjadi DOB. Aspirasi hari ini betul-betul serius. Pemerintah nampaknya belum bisa serius untuk bisa membuka keran pembentukan DOB,” katanya.

Politisi dari dapil Kaltim dan Kaltara ini berharap, aspirasi yang disampaikan bisa menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah untuk secara selektif memberikan kesempatan kepada daerah yang memang membutuhkan otonomi. Komisi II sebagai mitra Kemendagri, sambung Hetifah, saat ini sudah mendesak presiden agar mengambil keputusan menyangkut desain besar otonomi daerah sekaligus memperhitungkan beberapa daerah strategis untuk menjadi daerah otonom sendiri.

Di tempat yang sama, Gubernur Kaltara menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan Komisi II yang telah menerima aspirasi ini. Kaltara sebagai provinsi baru dan anak bungsu Republik ini, harus diperlakukan khusus agar bisa mengejar ketinggalannya, apalagi ini provinsi perbatasan.

Menurutnya, harus ada kebijakan politik dari pemerintah untuk mempercepat pembangunannya. “Tujuan DOB ini adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman pulau terluar di negeri kita,” jelas Gubernur. ■

(rmm/mp) Foto: Doeh/od

Komisi I DPR Uji 18 Calon Dubes

Komisi I DPR RI melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 18 calon Duta Besar LBBP yang diajukan Presiden Joko Widodo. Uji kelayakan dan kepatutan akan digelar selama dua hari, Senin hingga Selasa (23 - 24/10/2017) di Gedung DPR RI, Senayan.

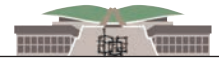
“Hari ini dan besok, Komisi I melaksanakan fit and proper test 18 calon duta besar, apakah mereka-mereka sudah punya kompetensi untuk itu atau belum, karena duta besar itu berfungsi sebagai wakil pemerintah dan berkuasa penuh di negara yang ditempatkan,” ungkap Anggota Komisi I

Nurdin Tampubolon, Senin (23/10/2017).

Politisi F-Hanura ini menambahkan, uji kelayakan dan kepatutan calon dubes hanya memberikan pertimbangan. Menurutnya, beberapa hal akan menjadi penilaian, diantaranya pemahaman kandidat tentang negara tujuan serta bagaimana prospek hubungan diplomatik



Anggota Komisi I Nurdin Tampubolon.



kedua negara ke-depan.

"Kebetulan ada negara yang strategis untuk ditempati duta besar kita, seperti Republik Rakyat Tiongkok, Jerman dan Spanyol. Hubungan perdagangan kita cukup besar dengan RRT dan Jerman, sehingga perlu kita melihat hal-hal yang akan dibantu calon Dubes saat mereka bertugas," jelas Nurdin.

"Juga bagaimana mendatangkan investor ke Indonesia dalam arti yang saling menguntungkan, termasuk mengenai penanganan isu-isu strategis, ini yang akan kita nilai apakah mereka layak atau tidak," imbuhnya.

Uji kepatutan dan kelayakan 18 calon

Dubes akan berlangsung selama beberapa sesi. Keputusan akhir Komisi I akan diambil dalam rapat pleno setelah mendengar pendapat dari seluruh fraksi.

Berikut daftar nama calon Dubes, yakni: Ade Padmo Sarwono (Dubes RI untuk ASEAN), Arif Havas Oegroseno (Dubes RI untuk Jerman), Djauhari Oratmangun (Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia), Hermono (Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol dan UNWTO), Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo (Dubes RI untuk Portugal), Iza Fadri (Dubes RI untuk Myanmar), Amhar Azeth (Dubes RI untuk Rumania merangkap Moldova), Marina Estella Anwar Bey

(Dubes RI untuk Peru merangkap Bolivia), Muliaman Darmansyah Hadad (Dubes RI untuk Swiss), dan Niniek Kun Naryatie (Dubes RI untuk Argentina merangkap Paraguay dan Uruguay).

Selanjutnya, Pratito Soeharyo (Dubes RI untuk Laos), Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi (Dubes RI untuk Fiji), Rossalis Rusman Adenan (Dubes RI untuk Sudan merangkap Eritrea), Salman Al Farisi (Dubes RI untuk Afrika Selatan), Sinyo Harry Sarundajang (Dubes RI untuk Filipina), Sudirman Haseng (Dubes RI untuk Kamboja), Sudjatmiko (Dubes RI untuk Brunei Darussalam), serta Todung Mulya Lubis (Dubes RI untuk Norwegia) ■

(ann/mp). Foto: Azka/od.

Komisi IV DPR Terima Audiensi DPM UGM Terkait HTI

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menilai HTI (hutan tanaman industri) harus disempurnakan dan penegakan hukumnya harus diperkuat. Dimana yang salah dan siapapun dia harus tetap dihukum. Hal tersebut diungkapkannya saat audiensi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Kehutanan UGM (Universitas Gajah Mada), di ruang rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Senin (23/10/2017).

"Kami menerima audiensi dengan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam dewan perwakilan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Mereka memaparkan hasil penelitian mereka terkait keberadaan HTI apakah masih bermanfaat. Mereka survey menggunakan kuesioner dengan responden para mahasiswa kehutanan sendiri. Mereka menyimpulkan bahwa HTI masih sangat bermanfaat bagi masyarakat kehutanan. Dan kami juga merasa demikian. HTI saat ini masih menjadi solusi permasalahan masyarakat kehutanan. Namun, sayangnya solusi tersebut belum diperkuat atau dilakukan penegakan hukumnya," ungkap Edhy.

HTI harus disempurnakan, lanjut Edhy, terutama dalam hal penegakan hukumnya juga harus diperkuat. Dimana yang salah, tetap harus dihukum. Dalam hal ini, ia menilai pemerintah agak lalai dengan mengatakan bahwa HTI tidak jalan. Padahal HTI sebagai salah satu cara untuk melindungi hutan juga. Bahkan diyakininya, semua perusahaan HTI sejatinya juga berpikir untuk membangun. Karena selain mencari untung, perusahaan HTI juga ingin agar usahanya tersebut sustainable atau berkelanjutan.

Konsep tersebut menurut Politisi

dari Fraksi Partai Gerindra ini juga telah banyak dilakukan oleh Negara-negara lain. Sementara di Indonesia sendiri hal itu masih tumpang tindih dan terganjal oleh beberapa kepentingan lainnya, seperti perkebunan dan tanah, belum lagi rencana pengembangan kabupaten baru di dalamnya dibutuhkan lahan.

"Dari audiensi ini kita sepakat bahwa ada yang harus diperkuat. Ada nilai-nilai yang harus kita jaga, yakni manfaat terhadap lingkungan sekitarnya, bukan kuat-kuatan atau menang-menangan,"

ujarnya.

Terkait aspirasi DPM Fakultas Kehutanan yang mengusulkan adanya revisi undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Edhy yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Roem Kono dan beberapa anggota DPR lainnya mengakui bahwa undang-undang tersebut harus segera disempurnakan, bahkan jika dibutuhkan dilakukan revisi seutuhnya. Mengingat dari sisi filosofisnya pun sudah berbeda. ■

(ayu/mp). Foto: Riezka/od.



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat menerima DPM Fakultas Kehutanan UGM



Tim Kunjungan Spesifik BURT DPR yang di Pimpin Wakil Ketua Elva Hartati berfoto bersama di Kantor Gubernur Sumatera Barat.

BURT Sosialisasikan Pembangunan Gedung di Sumbar

Rencana pembangunan Gedung DPR RI yang akan dimulai tahun depan menjadi isu utama kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Spesifik BURT DPR Elva Hartati saat melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2014-2019. Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan jajaran Pemrov. Sumatera Barat di Padang, Rabu (25/10).

Menurut Elva, penting dan mendesaknya pembangunan Gedung DPR sebab Gedung kantor anggota (Nusantara I) sudah melebihi daya tampung. Kapasitas sesuai rencana hanya 800 orang, kini dihuni lebih dari 3.000 orang.

Untuk itu politisi PDI Perjuangan ini melakukan sosialisasi dengan mendatangi berbagai provinsi dan melakukan pertemuan dengan akademisi, LSM, ormas Muhammadiyah yang merupakan ujung tombak penyampai aspirasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat nantinya tidak berfikir negatif kepada DPR dan percaya dengan pembangunan gedung tersebut.

Selain itu, lanjutnya, alasan

membangun gedung, karena saat ini kondisinya sudah retak dan sudah berapa kali disuntik." Untuk itu pula, masyarakat diharapkan bisa mendukung. Apalagi pembangunan gedung itu akan kita serahkan semua kepada pemerintah yakni Kementerian PUPR, mulai dari desain maupun anggaran," jelasnya dengan menambahkan bahwa pembangunan akan dilakukan tahun depan, dan anggarannya sudah disetujui Menteri Keuangan.

Hal yang sama diungkapkan Anggota BURT dari F-PDIP Rendy M Affandy Lamadjido, meski pembangunan Gedung DPR bukanlah hal yang mutlak, namun kondisi gedung Nusantara I sudah tidak bisa menampung beban, mestinya hanya untuk 800-1500 orang, namun

sudah mencapai 3.000 orang. Belum lagi banyak tamu yang datang, sejumlah staf dan tenaga ahli serta dokumen seberat 2 sampai 3 kg. "Jangan sampai nanti kalau terjadi insiden, baru kita memikirkan gedung baru," ujarnya.

Rendy mengatakan, pembangunan gedung baru bukan milik anggota DPR, bukan milik partai tetapi milik bangsa dan



Tim Kunjungan Spesifik BURT DPR saat pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Barat.



negara dan bisa menjadi monumen yang menciptakan kewibawaan lembaga ini. "Saya melihat gedung ini desainnya sangat berwibawa yang bisa mengakomodasi 34 provinsi dan kurang lebih 400 kabupaten," jelasnya.

Tokoh masyarakat dari PW Nadhatul Ulama (NU), Shofwan Karim yang hadir dalam acara ini mengapresiasi pembangunan gedung DPR. "Menurut saya, memang harus dibangun gedung baru DPR karena saya merasakan saat berkunjung ke gedung di Kawasan Senayan itu sudah retak dan condong," ucapnya. ■

(runi.mp), Foto: Rumi/od



Baleg Minta Pemerintah Aktif dalam Penyelesaian RUU Prioritas

Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU. Saat rapat penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) RUU prioritas tahun 2018 di Ruang Rapat Baleg, yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, beberapa anggota DPR meminta peran aktif pemerintah dalam keikutsertaan pembahasan dan perancangan RUU yang telah ditetapkan menjadi Prolegnas.



Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto.

lembaga-lembaga pemerintah. Meski demikian, DPR bisa memahami kondisi anggaran dan keuangan negara yang harus memberikan kesejahteraan layak kepada para abadinya.

"ASN misalnya, mengubah 1-2 pasal yang penting ada kesepahaman pemerintah dan DPR tidak membebani anggaran negara sehingga pemerintah jangan takut untuk membahas untuk membebani anggaran negara. DPR cukup paham dengan keputusan anggaran kita. Mencari solusi harapan masyarakat yang sudah sekian lama jadi pekerja honorer mengabdikan ke depan kita selesaikan dengan RUU kita," jelas Totok di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Selasa (17/10) sore.

Berkenaan dengan RUU Pertembakauan, dilaporkan juga oleh pansus yang membahas RUU ini agar pemerintah aktif dalam pembahasan bersama DPR. Karena RUU ini seharusnya bisa cepat diselesaikan kalau saja pemerintah cepat merespons.

"Misalnya (RUU) Tembakau, karena sekarang masih tahap pembahasan masih menunggu pembahasan bersama pemerintah. Kalau tidak disepakati menjadi UU, ya prosesnya tidak rumit kalau pemerintah datang mengatakan tidak bisa melaksanakan pembahasan selesai, tidak nggantungi," ujar Totok. ■

(eko.mp), Foto: Rumi/od

Lebih fokus lagi Totok berharap dalam penyelesaian RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU Pertembakauan, agar segera rampung. Dia beranggapan, jika pemerintah mau turun tangan, RUU itu bisa segera rampung. Menurutnya masih ada ketidaksepahaman antara DPR dengan pemerintah. Dia juga berharap agar pemerintah dapat memberi kepastian kepada pegawai honorer.

Baleg DPR meminta supaya pemerintah mengambil sikap keberpihakan pada pekerja honorer yang telah mengabdikan diri pada

Renstra Menata DPR Menuju Parlemen Modern

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang menata diri berupaya mewujudkan visinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern dan berwibawa. DPR menginginkan adanya transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dan diharapkan menjadi pusat pembelajaran serta pengetahuan demokrasi di Indonesia.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing saat melakukan sosialisasi Renstra DPR 2014 - 2019, mengatakan perlunya penataan Lembaga Perwakilan Rakyat agar menjadi kuat, untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang diwakili. Menurutnya, Renstra ini adalah upaya dalam mewujudkan parlemen modern, salah satunya adalah gedung parlemen yang lebih representatif untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan.

“Gedung Parlemen adalah milik rakyat, yang berarti kebebasan setiap orang bisa masuk, tetapi gedung parlemen terbebas bisa masuk adalah hanya di Indonesia. Apakah perlu dibiarkan seperti ini tidak ditata. Seharusnya Gedung Parlemen merupakan sebuah ikon yang bisa dikunjungi sebagai tempat wisata demokrasi dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri,” katanya, usai mendengarkan masukan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Akademisi, di Pekanbaru, Riau, Rabu (25/10/2017).



Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing didampingi Pimpinan dan Anggota BURT menyerahkan cenderamata kepada Pemprov Riau

Hal lain seperti, kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung dan kualitas dari Anggota DPR juga menjadi prioritas tercapainya tujuan Renstra ini. Namun ini tergantung dari Undang-Undang yang perlu dikaji kembali.

“Negara akan kuat, kalau DPR-nya kuat. Tidak ada negara yang kuat dengan DPR-nya yang tidak kuat. Jadi

demokrasi Indonesia harus tetap kita jaga dan harus kita tata sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara.” ujarnya.

Terkait dengan penilaian masyarakat mengenai citra Dewan berdasarkan target kinerja DPR, politisi partai Golkar itu pun menerimanya dan DPR senantiasa memperbaiki citra itu. ■

(as.mp), Foto: Agung/od

Pendidikan Agama Sejak Dini Sangat Penting

Ketua tim Kunjungan Kerja Panja RUU Penghapusan Kekerasa Seksual (PKS) Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, pemahaman keagamaan seseorang harus diperkuat untuk mengurangi tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur, karena salah satunya penyebabnya ialah salah pergaulan.

“Harus ada cara pencegahan agar hal tersebut tidak terulang lagi dan memakan korban. Pertama regulasi yang diperkuat serta adanya perbaikan jangka panjang yang harus diperhatikan yaitu pendidikan agama,” ungkap Abdul Malik saat berdiskusi dan menyerap aspirasi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dengan Dinas Sosial, Badan

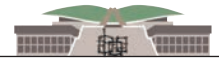
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, LSM dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Aula Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (20/10/2017).

Pasalnya, kata Abdul Malik, dari data Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi (PPT-KKTPA) Jawa Timur, menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2013

ada 399 kasus, tahun 2014 ada 349 kasus, tahun 2015 ada 625 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 426 kasus.

Selain itu, terdapat beberapa jenis kekerasan yang ditemukan antara lain kekerasan fisik, psikis, perkosaan, pencabulan, sodomi, trafficking. Dari banyaknya kasus tersebut yang paling banyak dialami oleh anak dan perempuan adalah perkosaan dan pencabulan. Hal ini juga menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi nomor satu yang memiliki kekerasan seksual secara nasional.

“Anak harus diajarkan adab memandang lawan jenis, berilah pengertian mengenai adab beragama dalam memandang lawan jenis sehingga anak dapat mengetahui hal-hal yang



APBN 2018 Didorong Fokus Peningkatan Kualitas Dosen, Beasiswa dan Akreditasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada APBN 2018 lebih memprioritaskan pada program yang terkait dengan beasiswa mahasiswa, mutu dosen dan mutu perguruan tinggi melalui akreditasi. Menurutnya, prioritas ini penting dilakukan dalam menjawab berbagai masalah di perguruan tinggi di Indonesia.

“Anggaran fungsi pendidikan 2018 di Kemenristekdikti sebesar Rp 40,3 triliun, saya tekankan harus fokus memperhatikan beasiswa bagi mahasiswa, mutu dosen dan akreditasi PTN dan PTS di Indonesia,” tegas Sutan, sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Sementara pada aspek beasiswa mahasiswa dan kualitas dosen, politisi F-Gerindra itu meminta kepada Mensitekdikti, untuk adanya peningkatan jumlah penerima dan satuan biaya Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa ADiK, Beasiswa Dosen S2/S3 DN/LN dan Pendampingan Prodi Kedokteran.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra bersama pimpinan lainnya

Indikasi kualitas dosen juga terlihat dari ketimpangan mutu dosen juga terlihat dari rasio dosen yang telah menempuh Strata Tiga dan Guru Besar.

“Sangat mencolok perbedaannya, hampir 73 persen kampus swasta tidak memiliki dosen yang berkualifikasi doktor,” imbuh Sutan.

Sutan jugamenyoroti masalah akreditasi Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah meningkatkan akreditasi, sehingga tidak ada lagi Perguruan Tinggi yang ber-akreditasi C di Indonesia. Pasalnya, akreditasi turut memengaruhi kualitas lulusan Indonesia.

“Jika terus diperjuangkan, dalam jangka panjang lulusan kita akan menjadi yang terbaik dan dapat bersaing di skala Internasional, apalagi dalam menghadapi era globalisasi, kualitas dan kompetensi menjadi aspek utama yang harus kita ke depankan,” tegas Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu berkomitmen memperjuangkan peningkatan penerima beasiswa bagi mahasiswa dan dosen. “Tidak hanya penerima yang kita tingkatkan, satuan

biaya beasiswa dan akreditasi perguruan tingginya pun akan terus saya perjuangkan agar terus meningkat,” tutup Sutan. ■

(sf,mp) Foto: Arelifod



Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU PKS Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain

baik dan buruk,” tegasnya.

Atas dasar itu, Komisi VIII DPR meminta perhatian khusus kepada

aparatus pemerintah seperti Bupati, Walikota dan Polisi untuk lebih serius menangani kasus ini. “Dengan adanya

UU ini nanti kami berharap polisi makin kuat dan tegas dalam penegakan hukum sehingga dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual,” pungkask legislator dari F-PKB.

Dalam kesempatan itu, Asisten Sekda Jatim Abdul Hamid meminta kepada DPR untuk memasukkan beberapa poin penting kedalam RUU nanti. Pertama kepastian regulasi yang jelas, kedua sosialisasi pemakaian gadget yang bermanfaat dan ketiga bagaimana model rehabilitasi bagi pelaku kekerasan tersebut.

“Dengan adanya RUU ini nanti warga negara khususnya perempuan serta anak-anak akan mendapat rasa aman, perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan seksual yang merendahkan martabat manusia,” tandas Abdul Malik. ■

(Jay,mp) Foto: Jayadi/od

Penerimaan Pajak Juga Harus Jaga Iklim Usaha

Ketua Komisi XI DPR Melcias Markus Mekeng meminta pemerintah untuk tidak terlalu ketat dalam mengejar penerimaan negara melalui pajak. Jika ingin menggenjot penerimaan negara melalui pajak juga harus dijaga iklim usaha agar tetap berkelanjutan.

Politisi Golkar ini pun mengingatkan agar pemerintah tidak saja memberikan beban pajak pada pengusaha menengah, tetapi pengusaha besar dibiarkan saja. Misalnya dalam konteks penjualan *online* jika diberikan beban pajak dikhawatirkan akan menurun penjualannya.

“Kalau pajak terlalu ketat orang malah takut dan ekonomi enggak bergerak. Tolong sampaikan pada aparat pajak yang diuber-uber jangan itu-itu saja, yang besar malah enggak dipajaki. Online

dipajaki, jangan sampai penjualan online melemah,” ucap Mekeng saat Raker dengan Wakil Menkeu Mardiasmo, Kamis, (19/10).

Menanggapi hal ini, Mardiasmo akan menerima masukan ini dan akan membicarakannya lebih lanjut dengan tetap menjaga dunia usaha dengan baik dan kondusif. “Fungsi pajak saya kira ini bisa dibicarakan agar dunia usaha baik dan kondusif,” kata Mardiasmo.

Sebagaimana diketahui, target penerimaan perpajakan dalam RAPBN



Ketua Komisi XI DPR Melcias Markus Mekeng.

2018 dipatok Rp1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka yang lebih tinggi ini diharapkan akan mampu mendorong kinerja pemerintah agar lebih baik, namun perlu diperhatikan dari sudut pandang kemampuan masyarakat dalam membayar pajak jika target pajak mengalami kenaikan. ■

(hs/mp), foto: andri/hr

UU PPMI Lindungi Pekerja Migran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) akan menekankan pada perlindungan TKI. Menurutnya, ini yang membedakan dengan regulasi sebelumnya yang menekankan pada penempatan.

“Ini pertama secara umum kita menekankan kepada pelindungannya, jadi kalau dulu penempatannya, seakan-akan penempatannya itu menjadi domain yang sangat khusus dalam undang-undang kemarin itu,” kata Saleh dalam diskusi Forum Legislasi bertema Implementasi UU TKI dan kendalanya bersama aktivis *Migrant Care* Siti Badriyah dan Pengamat BPJS Heri Soesanto,

Selasa (24/10/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi PAN ini menegaskan bahwa DPR akan berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan migran. “Kalau sekarang dari segi judulnya perlindungan pekerja migran Indonesia, nah di dalamnya nanti ada soal penempatan dan sebagainya tetapi esensi yang paling utama adalah bagaimana agar pekerja

migran kita di luar negeri betul-betul mendapat perlindungan,” tutur Saleh.

Salah satu perhatian DPR terhadap migran adalah dengan memberinya jaminan BPJS. “Asuransi TKI yang dulu berlaku, sudah berakhir sejak Juli 2017. Kontraknya sudah habis, jadi langsung nyambung dengan BPJS,” terangnya.

Jadi, kata Saleh, begitu TKI akan berangkat ke luar negeri, maka sejak saat itu harus sudah dicover oleh BPJS. Karena memang persyaratannya dalam UU PPMI seperti itu. “Artinya perusahaan tersebut harus punya modal dulu dong. Jadi mulai 1 Agustus 2017, harusnya 100.000 TKI yang ada di luar negeri tercover,” tambahnya.

Legislator dapil Sumut ini juga menegaskan selain mendapatkan jaminan BPJS, TKI juga akan memperoleh pelatihan yang diharapkan mampu mendorong kreatifitas TKI di luar negeri. “Ada pelatihan manajemen investasi yang diberikan kepada TKI minimal pelatihan kerja,” ujar Saleh. Namun begitu, lanjut Saleh, pelaksanaan BPJS tersebut secara detailnya akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Permen, termasuk koordinasi dengan BNP2TKI. ■

(hs/lw), Foto: Andri/od



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

Bandara Silangit Diharapkan Tingkatkan Pariwisata dan Ekonomi

DPR berharap keberadaan Bandara Silangit sebagai bandara kategori internasional yang sebentar lagi akan diresmikan pada tanggal 28 Oktober mendatang oleh Presiden Joko Widodo, bisa menjadi percontohan prasarana penunjang untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Kita tahu kedatangan masyarakat khususnya wisatawan lokal maupun mancanegara cukup tinggi disini. Kita berharap dengan dibukanya rute internasional akan menambah frekuensi wisatawan asing,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam kunjungan kerjanya saat meninjau Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (21/10/2017).

Menurut Sigit, ada dua kategori terkait wisatawan asing, pertama wisatawan asing yang banyak membelanjakan uangnya, tetapi dampak sosialnya rendah seperti halnya wisatawan-wisatawan kelas atas. Namun yang perlu diantisipasi adalah wisatawan kategori *backpacker*.

“Belanjanya sedikit, tapi dampak sosialnya besar misalnya dia tidur di rumah-rumah warga yang mana mereka beda dengan kita, kehadirannya dikhawatirkan mencemari budaya-budaya kita,” ujarnya.

Soal Bandara Silangit, Sigit juga

meminta agar ada koordinasi yang aktif antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perhubungan. “Jangan sudah ada bandara internasional, tapi aksesnya masih minimalis seperti lebar jalannya masih empat setengah meter. Ini yang perlu kita sinergikan lagi,” katanya.

Sigit menambahkan kalau dalam enam bulan ini tidak ada penerbangan rutin regular ke bandara ini, bukan tidak mungkin status Silangit sebagai bandara internasional akan dicabut.

“Tinggal nanti progress-nya bagaimana kita lihat ke depan, mudah-mudahan dengan diberi target enam bulan untuk melengkapi diri membangun jaringan komunikasi dan seterusnya dapat tercapai dan targetnya itu tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat dan bisa juga mengembangkan ekonomi lokal,” katanya.

Sementara itu GM Bandara Silangit mengatakan status sebagai bandara

internasional sudah didapat sejak tanggal 8 September 2017 yang lalu dan sudah diputuskan oleh Menteri Perhubungan, untuk mempersiapkan bandara ini guna mendukung program pemerintah terutama dalam kegiatan pariwisata.

“Kita ini inline dan sudah kita persiapan dengan baik hal-hal yang berkaitan seperti x-ray sudah double camera. Termasuk di bea cukai dan imigrasi juga sedemikian rupa sudah kita persiapan dengan bahkan sama dengan bandara yang ada di Soekarno-Hatta,” katanya.

Namun, ketersediaan ruangan penumpang menjadi agak kecil karena memang sebelumnya tidak untuk kategori internasional. “Yang pasti sejauh ini kita masih bisa mengantisipasi jumlah penumpang internasional untuk tanggal 28 Oktober mendatang termasuk 96 orang penumpang dari Singapura yang akan datang yang akan kita layani dengan sangat baik,” jelasnya.

Turut serta dalam rombongan, Sudjadi (PDIP), Sadarestuwati (PDIP), Subarna (F-Gerindra), Wellem Wandik (F-PD), Rooslynda Marpaung (F-PD), Bakri (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), dan Sahat Silaban (F-Nasdem). ■

(nt/sc), Foto: Nadya/or



Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo beserta tim saat meninjau Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumut.



Anggota Timwas Pembangunan Perbatasan DPR RI saat kunjungi Kab. Natuna, Kepri

Natuna Miliki Potensi Wisata Menarik

Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25% lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi wisata yang sangat menarik. Kawasan perairan Natuna merupakan titik potensial untuk menjadi poros maritim dunia sehingga daerah NKRI itu juga harus terus dibangun pemerintah dan dihormati negara lain. Namun sayangnya, banyak dari potensi tersebut belum seluruhnya terkelola dengan baik. Salah satunya adalah taman batu granit alami, Alif Stone Park

“Ini kemurahan Tuhan yang memberikan alam yang begitu indah di Natuna, saya melihat tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menjanjikan apabila dikelola dengan baik dan ditunjang oleh sarana prasarana yang mendukung,” tutur politisi PPP Amirul Tamim dalam Kunjungan Timwas Pembangunan Perbatasan DPR RI di Kab. Natuna, Kepri, Kamis (19/10/2017).

Saat meninjau salah satu destinasi wisata yang belum terkelola dengan baik, Amirul Tamim meminta pemerintah membangun fasilitas pendukung, seperti hotel untuk meningkatkan kunjungan

wisata. Ia juga mendorong, Kementerian Pariwisata untuk aktif mempromosikan Kepulauan Natuna menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Hal serupa juga diutarakan Ketua Timwas DPR RI Sukiman, ia mengatakan masyarakat setempat patut bersyukur memiliki alam Natuna yang indah. Menurutnya, potensi pariwisata yang dimiliki Natuna dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, apabila dikelola dengan baik serta didukung sarana penunjang.

Sebelumnya, salah satu pengelola Alif Stone Park Heri Bakti menuturkan, sepiunya pengunjung di tempat wisata

ini disebabkan oleh pembangunan hotel yang masih sedikit. “Banyak kendala yang dihadapi untuk meningkatkan jumlah wisatawan antara lain jumlah hotel yang minim, tidak ada penerbangan langsung ke Natuna dan minimnya promosi yang dilakukan Pemkab Natuna,” tutur Heri pengelola Alif Stone Park.

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprpti menuturkan, Pemkab Natuna sudah berupaya meningkatkan jumlah penerbangan ke Kab Natuna ini diwujudkan dengan menambah penerbangan dari satu minggu hanya tiga kali ditambah menjadi enam kali. ■

(ryan.mp) Foto: Rryan/od

DPR desak Kerjasama Internasional atasi krisis migrasi Rohingnya

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa kerjasama internasional diperlukan untuk tangani krisis migrasi Rohingnya.



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat diskusi tentang isu integrasi migran pada Sidang OECD di Paris.

Hal ini disampaikan saat diskusi tentang isu integrasi migran pada Sidang *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) Global Parliamentary Network Meeting tanggal 11 Oktober 2017 di Paris.

“Tantangan utama dalam melakukan integrasi migran adalah adanya stereotip setiap kelompok agama, nasional atau etnis yang mengarah pada xenofobia berdasarkan kepercayaan, agama, atau etnis. Pemerintah harus melakukan dialog reguler dan menegakkan adaptasi migran melalui pendidikan. Kita harus menghentikan kampanye xenophobia yang dapat menghambat integrasi sosial para migran,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat internasional perlu melakukan tindakan bersama untuk mengatasi masalah migrasi yang disebabkan oleh konflik dan krisis kemanusiaan. Terutama dengan krisis kemanusiaan baru-baru ini di Myanmar yang menyebabkan lebih dari 400.000 Muslim Rohingnya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh. Hal ini ditegaskannya bukan lagi masalah internal Myanmar, melainkan sudah menjadi isu Internasional terkait krisis kemanusiaan.

Dalam forum tersebut, Politisi Demokrat ini minta anggota OECD dan

negara-negara mitra untuk bekerja sama dalam memberikan solusi terbaik untuk krisis kemanusiaan ini dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Karena tugas anggota parlemen, adalah untuk memastikan bahwa negara kita sepenuhnya berkomitmen, melaksanakan dan mematuhi konvensi dan perjanjian internasional yang relevan dengan isu-isu kemanusiaan, dan memiliki keinginan politik yang kuat untuk mengatasi persoalan kemanusiaan dengan memegang teguh prinsip bersama dalam keragaman (*unity in diversity*).

Pada isu *integration of imigrants – case study*, OECD mencatat sejumlah data seperti jumlah pengungsi dan migran di negara-negara OECD yang menjadi sangat tinggi di tahun 2016 seiring dengan meningkatnya jumlah krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Pemerintah harus memberikan fokus kepada pengungsi yang kemungkinan besar akan berpindah ke negara penerima dan mengintegrasikan mereka pada masyarakat serta lapangan pekerjaan. OECD memberikan usulan untuk mengkaji ulang kebijakan nasional pemerintah dan kerjasama internasional dalam rangka mengatasi permasalahan integrasi para migran di negara-negara penerima.

OECD 2017 *International Migration Outlook* menunjukkan bahwa arus migrasi permanen ke negara-negara OECD sangat tinggi, dengan total 5 juta orang berpindah secara permanen ke negara-negara OECD di tahun 2016. Migrasi akibat krisis kemanusiaan merupakan salah satu faktor kenaikan jumlah migrasi tersebut. 1,5 juta pencari suaka mendaftarkan dirinya ke negara-negara OECD di tahun 2016. Turki sendiri memberikan perlindungan sementara ke lebih dari 3 juta pengungsi Suriah. Bagaimana negara-negara OECD dan negara partner dapat memberikan solusi terhadap integrasi para migran di masyarakat

OECD menyelenggarakan Sidang the OECD Global Parliamentary Network Meeting pada tanggal 11-12 Oktober 2017 dengan mengangkat tema “*Bridging Divides*”. Tema ini diangkat karena OECD melihat semakin besarnya kesenjangan yang terjadi pada masyarakat dunia akibat globalisasi yang tidak bisa membawa manfaat bagi semua orang. Pada tahun 2016 terjadi berbagai peristiwa politik dunia yang meningkatkan gelombang populisme, nasionalisme dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. ■



Wakil Ketua DPR RI Korekku Taufik Kurniawan menerima kunjungan Duta Besar Finlandia H.E Ms. Päivi Hiltunen-Toivio di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10). Foto: Azka/od.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuka 'Pameran Kujang dan Keris Pasundan', di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (25/10). Foto: Arief/od.



Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melakukan sosialisasi Renstra DPR 2014 - 2019 ke Pekanbaru, Riau, Rabu (25/10). Foto: Agung/rni.